MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 291 /DJMT/ST.KP7.1/IX/2024

Menimbang : Bahwa Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sedang melaksanakan Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2024 dengan judul Penyeragaman Nomenklatur Nama Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

Dasar : Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 731/BLD.2/HM2.1.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Undangan Focus Group Discussion (FGD) Hasil.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama dan NIP/NRP	Jabatan dan Satuan Kerja	Gol/ Pangkat	Tanggal
1.	Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	Marsma TNI	25 sd. 28 September 2024
2.	Dr. Marimin, S.H., M.M.,M.H./ 13004/P	Kasubdit Pembinaan Administrasi Ditbinganisminmil	Kolonel Laut (H)	25 sd. 28 September 2024
3.	Kuat Gayu Raegen, S.H., M.H./ 11070053480285	Hakim Yustisial	Mayor Chk	25 sd. 28 September 2024
4.	Happy Rahmawati, S.E., M.M./ 198604132009122004	Kasi Tata Kelola Ditbinganisminmil	III/d	25 sd. 28 September 2024
5.	Meylan, S.Sos., M.M./ 197905112009122003	Kasi Tata Kelola Ditbinganismintun	III/c	25 sd. 28 September 2024
6.	Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H./ 199008282012122003	Kasi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganismintun	III/c	25 sd. 28 September 2024

Untuk : Mengikuti kegiatan Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2024 dengan judul Penyeragaman Nomenklatur Nama Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya bertempat di Hotel Horison Ultima Bekasi, Jl. K.H. Noer Ali, Kayuringin Jaya, RT.008/02, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat (17148);

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,



Yuwono Agung Nugroho
Marsekal Muda TNI